



PERS RELEASE

“GUGUS TUGAS DPR ANTI-KORUPSI MENDESAK PENGUATAN RELASI KORUPSI DENGAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN”

SENIN, 9 DESEMBER 2013

- Indonesian Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) National Chapter (Gugus Tugas DPR anti-korupsi) mendukung sepenuhnya langkah para anggota parlemen dunia yang mendesak dunia internasional mengaitkan *grand corruption* sebagai kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) maupun kejahatan HAM.
- *Grand corruption* merupakan bentuk paling parah dari kejahatan korupsi yang memiliki dampak negatif secara material dan psikis terhadap masyarakat dan pada integritas sistem internasional, sekaligus melanggar hak asasi manusia (HAM) secara universal.
- Dengan mengaitkannya sebagai kejahatan kemanusiaan dan HAM maka, yurisdiksi pelanggarannya tidak lagi berada di ranah nasional, tetapi dapat merembet di tingkat internasional. Bila hal demikian terjadi, mekanisme berikutnya dilakukan melalui mekanisme internasional.
- Laporan dari UN High Commissioner for Human Rights terkait *panel discussion on the negative impact of corruption on the enjoyment of human rights* yang menjadi salah satu dokumen 5th COP UNCAC, menggarisbawahi bahwa uang yang dikorupsi tiap tahunnya dapat mengatasi isu kelaparan dunia sebanyak 80 kali, uang yang dicuri dari publik juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan lain sebagainya. Kesimpulan apnel tersebut mengatakan bahwa gerakan anti-korupsi perlu untuk menggunakan mekanisme HAM internasional sebagaimana yang ada di Human Rights Council ataupun lembaga PBB terkait HAM yang dibentuk melalui traktat internasional seperti Committee on Economic Socio and Cultural Rights (CESCR), CEDAW, dan lain sebagainya.
- Gugus Tugas memandang *grand corruption* sebagai kejahatan kemanusiaan dan HAM dapat dilakukan melalui: **wewenang pengadilan nasional atas Yurisdiksi Internasional**. Debat yang mengemuka prinsip universalitas melanggar kedaulatan suatu negara. Sejauh ini hanya beberapa kejahatan yang masuk dalam prinsip ini diantaranya kejahatan perang, penyiksaan, kejahatan kemanusiaan; Melalui pembentukan **pengadilan regional** (*regional court*). Sejumlah contoh pengadilan regional seperti The Court of Justice of the Economic and Monetary Community of Central African States dapat menjadi bahan pertimbangan; Melalui Pengadilan Kriminal

Sekretariat Gugus Tugas DPR RI Anti-Korupsi

Ged. Nusantara III Lt. 4 DPR RI

Telp: 021 5715 842 / 294 / 210; Faks: 021 5715 295

Email: oprbsap@dpr.go.id / oprbsap@yahoo.com

Twitter: @SEAPACIndonesia; Website: <http://ksap.dpr.go.id/seapac>

Internasional (*International Criminal Court*), sejumlah kendala seperti hanya berlaku di negara peratifikasi Statuta Roma, maupun kejahatan harus terjadi di negara pihak Statuta Roma menjadi diskursus menarik; dan **mekanisme baru**, seperti amandemen UNCAC memasukkan *grand corruption* dalam yurisdiksi internasional, membuat konvensi baru, dan lain sebagainya.

- Gugus Tugas DPR anti-korupsi (Indonesian GOPAC National Chapter) akan mendorong pihak-pihak terkait baik secara ke dalam DPR maupun Pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai macam referensi aksi tersebut agar dapat memperluas jangkauan yurisdiksi pengadilan pelaku korupsi.
- Selain itu, Gugus Tugas DPR anti-korupsi terus berkomitmen untuk meningkatkan kampanye anti-korupsi di lingkup anggota parlemen. Sebagai informasi Gugus Tugas DPR anti-korupsi terdiri dari sedikitnya 28 anggota DPR berbagai fraksi dan komisi yang memiliki komitmen dan kepedulian dalam isu-isu anti-korupsi.
- Gugus Tugas berdiri pada akhir 2012, dengan Ketua Pramono Anung. Gugus Tugas telah melakukan kampanye *parliamentary awareness* tentang anti-korupsi melalui sejumlah *workshop* anti-korupsi dengan tema *Engaging Parliamentarians in United Nations Convention Against Corruption* dan *workshop* Gugus Tugas GOPAC Indonesia dengan tema *Funding of Political Campaign and Anti-Money Laundering* yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2013 di Jakarta.
- Pada September 2013, Gugus Tugas menjadi tuan rumah Sidang Umum South East Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) yang menghadirkan sejumlah narasumber kredibel seperti Transparency International, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IIDEA), sekaligus mendengar sumbang saran dari anggota parlemen Asia Tenggara dalam membangun sistem Pemilu yang lebih baik.

Tautan Media Online:

- <http://www.antaraneews.com/berita/408686/gugus-tugas-dpr-antikorupsi-berkampanye>
- <http://news.detik.com/read/2013/12/09/171531/2436784/10/dpr-kini-punya-gugus-tugas-antikorupsi-awasi-anggota-korup?9922022>
- <http://www.pikiran-rakyat.com/node/261728>
- <http://www.antaraneews.com/berita/408710/pramono-korupsi-kejahatan-kemanusiaan-dan-ham>
- <http://jaringnews.com/politik-peristiwa/wakil-rakyat/52811/hari-anti-korupsi-sedunia-dpr-dukung-korupsi-jadi-kejahatan-kemanusiaan-dan-ham>
- <http://nasional.inilah.com/read/detail/2054781/politik-gincu-gugus-tugas-dpr-anti-korupsi>

Sekretariat Gugus Tugas DPR RI Anti-Korupsi

Ged. Nusantara III Lt. 4 DPR RI

Telp: 021 5715 842 / 294 / 210; Faks: 021 5715 295

Email: oprbsap@dpr.go.id / oprbsap@yahoo.com

Twitter: @SEAPACIndonesia; Website: <http://ksap.dpr.go.id/seapac>